



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **CHUSNUNIA CHALIM**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **94198**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.493.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1737 m2/54 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.293.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/95 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/90 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 280.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.879.733.905**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	10.653.533.905
III. HUTANG	Rp.	502.620.210
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.150.913.695

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.